



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 47 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2022.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

**Pasal 3**

(1) Renja Dinas Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2022.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**NURDINYANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 47**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 47 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi maupun APBN.

Rencana Kerja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya ke dalam program dan kegiatan. Kualitas Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Kerja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Rencana Kerja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Rencana Kerja untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor ..... Tahun 2021 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor .....);

24. Peraturan Bupati Garut Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
25. Peraturan Bupati Garut Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1 Maksud**

Menjelaskan rumusan prioritas pembangunan, program, sasaran program, kegiatan, lokasi kegiatan, besaran dan sumber dana dan pelaksanaan kegiatan.

#### **1.3.2 Tujuan**

1. Sebagai acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan secara teknis administratif dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Garut Tahun 2022;
2. Memberikan perspektif tentang apa yang ingin dihasilkan ke depan;
3. Memberikan gambaran mengenai target yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **Bab IV Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah**

#### **Bab V Penutup**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja tahun 2020 melalui analisis terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Analisis dilakukan terhadap kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Evaluasi pencapaian tersebut akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, serta menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 melaksanakan 11 (sebelas) program utama yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, dan 3 (tiga) program yang sifatnya supporting terhadap program utama. Pada umumnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 telah sesuai dengan rencana dengan capaian kinerja sasaran 90% sampai dengan 100%, baik capaian masukan (*input*) keluaran (*output*) maupun hasil (*outcome*).

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik rencana maupun realisasi. Evaluasi ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output yang dihasilkan oleh suatu input tertentu yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya perbedaan maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pencapaian realisasi input sebesar Rp384.879.308.187,00 atau sebesar 95,18% dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp404.369.935.556,00. Hal ini disebabkan oleh adanya paket pekerjaan yang tidak dapat direalisasikan dan paket pekerjaan yang tidak selesai sampai akhir tahun anggaran 2020.

Pada indikator outputs pencapaian pada rata-rata kegiatan sebesar 98,41%, ini mengandung arti dari setiap perencanaan yang ditetapkan dapat mencapai target, begitu pula pada indikator outcome capaian kinerja rata-rata sebesar 92,37%. Dibandingkan dan dievaluasi dari target kinerja selama 5 tahun (RPJMD Tahun 2014-2019), rata-rata persentase pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2020 sebesar 90,65% dengan interpretasi baik.

Keberhasilan yang diperoleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak terlepas dari kendala dan permasalahan. Identifikasi permasalahan yang terjadi selama proses pencapaian sangat penting untuk diketahui, agar dapat ditetapkan langkah-langkah strategis sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama di tahun mendatang. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghadapi beberapa kendala masalah sosial, kendala pembebasan lahan, kendala cuaca, kinerja kontraktor yang kurang baik dan adanya pandemi *Covid-19* yang berpengaruh terhadap waktu penyelesaian pekerjaan. Di samping itu, kurangnya pembinaan teknis, sarana dan prasarana, program pembiayaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja juga menjadi kendala dalam upaya perwujudan akuntabilitas kinerja.

Perwujudan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih rendah hal ini diakibatkan oleh kurangnya koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha. Hal ini menyebabkan keseluruhan sumber daya yang ada tidak dapat digunakan secara optimal demi tercapainya kinerja yang maksimal. Di samping itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdampak terhadap kualitas akuntabilitas kinerja program dan kegiatan. Untuk mengatasi masalah yang tersebut di atas, maka perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bagi pegawai dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga kendala kekurangan SDM ini dapat teratasi dan akuntabilitas kinerja yang berkualitas dapat terwujud.

Permasalahan secara umum pada Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang antara lain pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, masih rendahnya produk hukum rencana tata ruang, masih banyaknya rumah dan gedung yang belum memiliki IMB, konektivitas antar wilayah masih belum memadai, belum fungsionalnya jalan baru dan rendahnya cakupan pelayanan air minum dan sanitasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dirumuskan pemecahan masalah yang akan dilakukan diantaranya membuat kebijakan produk rencana tata ruang, meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang, memantapkan peran koordinasi perencanaan di tingkat kabupaten, meningkatkan kinerja penyelenggaraan jalan dan meningkatkan pengelolaan air minum dan sanitasi.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Renstra sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>										
<b>I</b>	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Indeks aksesibilitas</b>	<b>1,490 Point</b>	-	<b>1,464 Point</b>	<b>1,386 Point</b>	<b>94,67%</b>			
1	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Baru	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan dan jembatan baru yang tersedia (dokumen)	100	12	32	30	93,75%			
2	Pembebasan Tanah untuk Jalan	Panjang lahan/tanah yang dibebaskan untuk pembangunan jalan baru (km)	62	32,4	2	2	100,00%			
3	Pembangunan Jalan Baru	Panjang badan jalan baru yang terbangun (km)	131	8,5	3,7	3,7	100,00%			
4	Pembangunan Jembatan Baru	Jumlah jembatan baru yang dibangun (km)	18	6	3	2	66,67%			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
II	<b>Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten</b>	<b>Persentase kemantapan jalan kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>79,20%</b>	<b>82,52%</b>	<b>81,30%</b>	<b>98,52%</b>			
1	Perencanaan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Jumlah dokumen perencanaan peningkatan/rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten yang tersedia (dokumen)	30	6	6	6	100,00%			
2	Peningkatan Jalan Kabupaten	Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan (km)	113,62	6,4	60,21	55,9	92,84%			
3	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi (km)	18,08	20,74	1,84	1,84	100,00%			
4	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	Panjang jalan kabupaten yang dipelihara (km)	754	364,89	651,95	651,95	100,00%			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	Peningkatan/ Rehabilitasi Jembatan Kabupaten	Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan/ direhabilitasi (bh)	15	6	10	10	100,00%			
6	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten	Jumlah jembatan kabupaten yang dipelihara (bh)	100	75	12	12	100,00%			
7	Penanganan Sementara Akibat Bencana Alam	Jumlah waktu pelaksanaan penanganan sementara jalan (th)	5	1	1	1	100,00%			
8	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Kabupaten	Panjang saluran drainase/gorong-gorong jalan kabupaten yang dibangun (km)	50	33,14	7,69	7,69	100,00%			
9	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan Kabupaten	Panjang turap/talud/ bronjong jalan kabupaten yang dibangun (km)	7,5	2,97	2,47	2,39	96,76%			
10	Tanggap Darurat Bencana Alam	Jumlah waktu penanganan tanggap darurat (th)	5	1	1	1	100,00%			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
11	Pengadaan Alat Berat	Jumlah alat berat yang tersedia (unit)	31	4	4	3	75,00%			
12	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat berat yang diperbaiki/dipelihara (unit)	28	20	8	8	100,00%			
13	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah alat laboratorium kebinamargaan yang diperbaiki/dipelihara (unit)	50	1	8	8	100,00%			
14	Pengendalian dan Pengawasan Ruang Milik Jalan	Jumlah waktu pengendalian dan pengawasan ruang milik jalan (th)	5	1	1	1	100,00%			
<b>III</b>	<b>Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Desa</b>	<b>Persentase kemantapan jalan desa</b>	<b>39,33%</b>	-	<b>36,69%</b>	<b>38,28%</b>	<b>104,33%</b>			
1	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Desa	Panjang jalan desa yang ditingkatkan/ direhabilitasi (km)	146,4	8,8	52,97	52,97	100,00%			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Jembatan Desa	Jumlah jembatan desa yang ditingkatkan/ direhabilitasi (bh)	125	18	53	52	98,11%			
3	Peningkatan/ Pembangunan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong Jalan Desa	Panjang saluran drainase/ gorong-gorong jalan desa yang ditingkatkan/ dibangun (km)	12,5	3,82	2,39	2,39	100,00%			
4	Peningkatan/ Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Jalan Desa	Panjang turap/talud/ bronjong jalan desa yang ditingkatkan/ dibangun (km)	12,5	0,34	1,96	1,96	100,00%			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
IV	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>Persentase kemantapan jalan</b>	<b>57,92%</b>					<b>49,95%</b>	<b>48,75%</b>	<b>97,60%</b>
	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang jalan yang dibangun, direkonstruksi, direhab dan dipelihara (km)</b>	<b>1493</b>					<b>595,3</b>	<b>286,72</b>	<b>48,16%</b>
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan (dokumen)	112					19	19	100,00%
2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Panjang lahan/tanah yang dibebaskan (km)	54,36					4,1	4,1	100,00%
3	Pembangunan Jalan	Panjang badan jalan baru yang terbangun (km)	116,24					16	15,55	97,19%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi (km)	549,18					99,5	86,08	86,51%
5	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi (km)	123,5					10,8	11,09	102,69%
6	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (km)	829					469	174	37,10%
7	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang terbangun (km)	3					0,17	0,2	117,65%
8	Pembangunan <i>Flyover</i>	Panjang <i>flyover</i> yang terbangun (km)	0,04					0,04	0,04	100,00%
9	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi (km)	1,43					0,25	0,25	100,00%
10	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara (km)	0,86					0,17	0,17	100,00%
11	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang jalan dan jembatan yang ditanggulangi (km)	10,15					2,03	2,03	100,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
12	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan (dokumen)	4					1	1	100,00%
13	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan (dokumen)	4					1	1	100,00%
<b>V</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Cakupan air minum layak</b>	<b>100%</b>	<b>79,84%</b>	<b>84,00%</b>	<b>85,08%</b>	<b>101,29%</b>			
1	Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan air bersih yang tersedia (dokumen)	20	0	4	4	100,00%			
2	Pembangunan Jaringan Air Minum	Jumlah unit/lokasi jaringan air bersih yang dibangun (unit)	254	158	102	102	100,00%			
3	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	Jumlah sumur-sumur air tanah yang dibangun (titik)	250	42	29	29	100,00%			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		<b>Cakupan sanitasi layak</b>	<b>100%</b>	<b>66,73%</b>	<b>73,60%</b>	<b>67,03%</b>	<b>91,07%</b>			
4	Perencanaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah dokumen perencanaan sarana dan prasarana sanitasi yang tersedia (dokumen)	25	0	1	1	100,00%			
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun (unit)	476	28	102	102	100,00%			
		<b>Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik</b>	<b>60%</b>	<b>47,50%</b>	<b>50,00%</b>	<b>48,29%</b>	<b>96,58%</b>			
6	Peningkatan/ Pembangunan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan/dibangun (km)	214,52	182,94	34,8	34,09	97,96%			
7	Peningkatan/ Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase yang ditingkatkan/dibangun (km)	230,88	6,1	13,04	13,04	100,00%			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8	Peningkatan/ Pembangunan TPT/Kirmir Lingkungan	Panjang turap/talud/ bronjong jalan lingkungan yang ditingkatkan/dibangun (km)	214,52	2,86	1,05	1,05	100,00%			
VI	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	<b>Cakupan air minum layak</b>	<b>90,74%</b>				<b>88,74%</b>	<b>88,74%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah tangga yang terlayani/ terpasang SPAM (SR)</b>	<b>43592</b>				<b>7532</b>	<b>7532</b>	<b>100,00%</b>	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen perencanaan teknis SPAM (dokumen)	10				0	0	0%	
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah rumah tangga terlayani/terpasang jaringan perpipaan (SR)	14700				0	0	0%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani/terpasang jaringan perpipaan (SR)	17142					2332	2332	100,00%
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani/terpasang jaringan perpipaan (SR)	8750					4450	4450	100,00%
5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang mendapat pengawasan dan pembinaan (desa/kelompok)	25					5	5	100,00%
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani/terpasang jaringan perpipaan (SR)	3750					750	750	100,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
VII	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	<b>Cakupan sanitasi layak</b>	<b>68,53%</b>					<b>67,27%</b>	<b>63,91%</b>	<b>95,00%</b>
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah tangga yang mempunyai pengolahan air limbah domestik (RT/KK)</b>	<b>15430</b>					<b>2100</b>	<b>1995</b>	<b>95,00%</b>
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan teknis pengelolaan air limbah (dokumen)	16					5	0	0%
2	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah tangga yang berakses sub sistem pengolahan setempat (RT/KK)	12430					1350	1282	94,96%
3	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah tangga yang berakses sistem pengolahan limbah skala permukiman (RT/KK)	3000					750	713	95,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
VIII	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi teknis</b>	<b>82%</b>	<b>70,84%</b>	<b>76,48%</b>	<b>74,32%</b>	<b>97,18%</b>			
1	Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis	Jumlah daerah irigasi teknis yang direhabilitasi/ ditingkatkan (DI)	38	12	33	32	96,97%			
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah daerah irigasi teknis yang dipelihara (DI)	38	38	38	38	100,00%			
3	Perencanaan Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	25	5	0	0	0%			
4	Penanganan Sementara Irigasi Akibat Bencana Alam	Jumlah daerah irigasi yang ditangani (DI)	38	8	0	0	0%			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		<b>Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi non teknis</b>	<b>79,36%</b>	<b>72,88%</b>	<b>73,84%</b>	<b>73,34%</b>	<b>99,32%</b>			
5	Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Non Teknis	Jumlah daerah irigasi non teknis yang di rehabilitasi/ ditingkatkan	141	26	154	153	99,35%			
<b>IX</b>	<b>Program Pengendalian Banjir</b>	<b>Persentase penurunan waktu genangan air di perkotaan Garut</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>50,00%</b>	<b>43,33%</b>	<b>115,39%</b>			
1	Pengendalian Banjir Perkotaan	Jumlah titik genangan yang ditangani (titik)	20	2	6	6	100,00%			
2	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Jumlah Sub DAS yang dipelihara (Sub DAS)	10	10	10	10	100,00%			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</b>	<b>Persentase penurunan titik rawan banjir</b>	<b>88,09%</b>	-	<b>67,95%</b>	<b>67,35%</b>	<b>99,12%</b>			
1	Peningkatan/ Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai	Jumlah Sub DAS yang ditingkatkan/dibangun (Sub DAS)	147	168	80	80	100,00%			
2	Penanganan Sementara Sub DAS Akibat Bencana Alam	Jumlah Sub DAS yang ditangani (Sub DAS)	40	1	8	8	100,00%			
		<b>Persentase tampungan air yang tersedia</b>	<b>100%</b>	-	<b>20,00%</b>	<b>6,93%</b>	<b>34,65%</b>			
3	Peningkatan/ Pembangunan Embung	Jumlah embung yang ditingkatkan/dibangun (unit)	16	3	5	5	100,00%			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	Pembebasan Sumber Mata Air	Jumlah mata air yang dibebaskan (unit)	75	0	2	2	100,00%			
<b>XI</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	<b>Persentase tampungan air yang tersedia</b>	<b>100%</b>					<b>30,16%</b>	<b>27,17%</b>	<b>90,09%</b>
	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah tampungan air baku yang dibangun (unit)</b>	<b>63</b>					<b>12</b>	<b>10</b>	<b>90,09%</b>
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan lingkungan untuk konstruksi (dokumen)	3					0	0	0%
2	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun (unit)	43					11	12	109,09%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dibangun (unit)	9					0	0	0%
4	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul yang dibangun (km)	51,33					5,11	5,11	100,00%
5	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Luas/panjang kolam retensi yang dibangun (km)	0,9					0	0	0%
6	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai/kali yang dinormalisasi (km)	50					10	10	100,00%
7	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah mata air yang dibangun/dibebaskan (unit)	11					1	0	0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan (kelompok/Sub DAS)	15					3	0	0%
		<b>Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi</b>	<b>88,04%</b>					<b>76,83%</b>	<b>75,29%</b>	<b>98,00%</b>
	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang jaringan irigasi yang dibangun, direhab dan dipelihara (km)</b>	<b>327</b>					<b>132</b>	<b>129,36</b>	<b>98,00%</b>
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan teknis konstruksi irigasi (dokumen)	13					2	2	100,00%
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dibangun (km)	2					0	0	0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang direhab (km)	97					27	24,36	90,22%
4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara (km)	105					105	105	100,00%
<b>XII</b>	<b>Program Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Gedung</b>	<b>Persentase bangunan ber IMB</b>	<b>43,20%</b>	-	<b>34,00%</b>	<b>8,07%</b>	<b>23,74%</b>			
1	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Bangunan	Jumlah dokumen bangunan Gedung Ber IMB (dokumen)	5	1	1	1	100,00%			
<b>XIII</b>	<b>Program Pembangunan/ Peningkatan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum</b>	<b>Persentase bangunan yang layak teknis</b>	<b>0,048%</b>	-	<b>0,028%</b>	<b>0,05%</b>	<b>178,57%</b>			
1	Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum yang tersedia (dokumen)	30	4	9	9	100,00%			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Umum	Jumlah fasilitas umum yang dibangun (unit)	250	166	30	29	96,67%			
3	Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun/ditingkatkan (unit)	57	8	0	0	0%			
4	Pengawasan dan Pengendalian Layak Teknis bangunan Gedung	Jumlah dokumen laporan pengawasan dan pengendalian layak teknis (SLF) bangunan gedung (dokumen)	5	1	1	1	100,00%			
<b>XIV</b>	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>Persentase bangunan gedung yang layak teknis dan fungsi</b>	<b>9,98%</b>					<b>8,40%</b>	<b>8,40%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Jumlah bangunan gedung yang layak teknis dan fungsi (unit)</b>	<b>515</b>					<b>102</b>	<b>102</b>	<b>100,00%</b>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah bangunan gedung yang ber IMB (unit)	500					100	100	100,00%
		Jumlah dokumen SLF yang terbit (unit)	15					2	2	100,00%
2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan bangunan gedung (dokumen)	30					6	6	100,00%
		Jumlah bangunan gedung daerah yang terbangun (unit)	17					2	2	100,00%
3	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang mendapat bantuan teknis (unit)	50					10	10	100,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara (dokumen)	3					0	0	0%
<b>XV</b>	<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>	<b>Persentase luas bangunan dan lingkungan yang tertata</b>	<b>30,00%</b>					<b>6,00%</b>	<b>6,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Luas bangunan dan lingkungan yang ditata (m2)</b>	<b>7500</b>					<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>100,00%</b>
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan (dokumen)	3					1	1	100,00%
2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Luas bangunan dan lingkungan yang ditata (m2)	7500					1500	1500	100,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan (dokumen)	3					0	0	0%
<b>XVI</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang</b>	<b>90,50%</b>	<b>78,83%</b>	<b>82,50%</b>	<b>82,50%</b>	<b>100,00%</b>			
1	Penyusunan RDTR	Jumlah RDTR yang tersusun (dokumen)	10	1	2	2	100,00%			
2	Penyusunan Perda RDTR	Jumlah Perda RDTR yang tersusun (dokumen)	5	2	1	1	100,00%			
3	Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan kegiatan evaluasi pengendalian dan pemanfaatan ruang (dokumen)	5	1	1	1	100,00%			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	Pengawasan dan Pengendalian Pengesahan Site Plan	Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian pengesahan siteplan (dokumen)	5	1	1	1	100,00%			
5	Pengawasan dan Pengendalian Rekomendasi Arahana Tata Ruang	Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian arahan tata ruang (dokumen)	5	1	1	1	100,00%			
<b>XVII</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang</b>	<b>84,50%</b>					<b>83,00%</b>	<b>83,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang (dokumen)</b>	<b>70</b>					<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00%</b>
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR/RDTR dan dokumen peta dasar dan tematik RDTR (dokumen)	41					9	9	100,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah peraturan pelaksanaan penataan ruang (dokumen)	29					1	1	100,00%
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah dokumen pemanfaatan ruang (dokumen)</b>	<b>5</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang (dokumen)	5					1	1	100,00%
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang (dokumen)</b>	<b>5</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang (dokumen)	5					1	1	100,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
XVIII	<b>Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Jasa Konstruksi</b>	<b>Persentase tersedianya layanan rekomendasi IUJK</b>	<b>100%</b>	-	<b>82,00%</b>	<b>82,69%</b>	<b>100,84%</b>			
1	Sosialisasi Penerbitan Rekomendasi IUJK Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (orang)	30	-	0	0	0%			
2	Pembuatan Rekomendasi IUJK	Jumlah rekomendasi IUJK yang dikeluarkan (dokumen)	1000	-	200	215	100,84%			
		<b>Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih</b>	<b>28,50%</b>	-	<b>8,50%</b>	<b>8,33%</b>	<b>98,00%</b>			
1	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur	Jumlah rekomendasi IUJK yang dikeluarkan (dokumen)	150	-	0	0	0%			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	Peningkatan Kompetensi Pegawai	Jumlah pegawai memperoleh peningkatan kompetensi (orang)	100	-	0	0	0%			
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan yang dimonitoring dan evaluasi (kegiatan)	250	-	51	51	100,00%			
4	Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi/Uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang mendapat sertifikat (orang)	200	-	0	0	0%			
		<b>Persentase data kajian litbang</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>30,00%</b>	<b>11,11%</b>	<b>37,03%</b>			
1	Kajian Potensi Bahan Lokal	Jumlah dokumen laporan kajian potensi bahan lokal yang tersedia (dokumen)	5	-	1	1	100,00%			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	Kajian Analisa Harga Satuan Berdasarkan Quarry	Jumlah dokumen laporan kajian analisa harga satuan berdasarkan quarry (dokumen)	5	-	1	1	100,00%			
3	Pilot Project Penerapan Teknologi Terapan	Jumlah dokumen teknologi terapan (dokumen)	4	-	0	0	0%			
4	Pengumpulan dan Penyediaan Data Lingkup PUPR	Jumlah dokumen data lingkup PUPR yang tersedia (dokumen)	25	-	4	4	100,00%			
5	Penyusunan Data Base Jalan	Jumlah laporan data base jalan (dokumen)	5	-	0	0	0%			
6	Penyusunan Data Base Jembatan	Jumlah laporan data base jembatan (dokumen)	5	-	0	0	0%			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	Pembuatan Data Base Bangunan Gedung	Jumlah laporan data base bangunan (dokumen)	5	-	0	0	0%			
<b>XIX</b>	<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	<b>Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat</b>	<b>31,04%</b>					<b>19,64%</b>	<b>19,64%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang mendapat pelatihan dan bersertifikat (orang)</b>	<b>980</b>					<b>357</b>	<b>357</b>	<b>100,00%</b>
1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi yang mendapat pelatihan (orang)	640					277	277	100,00%
2	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi yang memiliki sertifikat (orang)	340					80	80	100,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah data dan sistem informasi jasa konstruksi (dokumen)</b>	<b>28</b>					<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
1	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah perangkat layanan informasi jasa konstruksi (dokumen)	4					1	1	100,00%
2	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah data penggunaan material dan peralatan (dokumen)	10					2	2	100,00%
3	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah data dan profil pekerjaan konstruksi (dokumen)	8					1	1	100,00%
4	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (dokumen)	6					0	0	0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%					100,00%	100,00%	100,00%
	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>Jumlah pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan evaluasi (proyek)</b>	<b>260</b>					<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan evaluasi (proyek)	260					50	50	100,00%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Penataan Ruang, Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, Jasa Konstruksi dan Bangunan. Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempertegas peran dan fungsi dinas dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Garut.

Secara umum pelaksanaan pembangunan dibidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Penataan Ruang, Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, Jasa Konstruksi dan Bangunan yang dilaksanakan pada periode sebelumnya telah mencapai kemajuan, hal ini dapat ditunjukkan dengan perkembangan indikator makro pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi termasuk sinergitas dan koordinasi pembangunan antar SKPD, antar Kabupaten/Kota dan dengan Pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Dalam perkembangan ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan responsif, kreatif dan inovatif sehingga mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mengukur seberapa besar keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya pada tingkat pelayanan, maka diperlukan adanya analisa kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digunakan beberapa indikator dengan sasaran target sesuai dengan Renstra.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra, sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	Persentase kemantapan jalan kabupaten	-	-	82,52%				81,30%	-			
2	Indeks aksesibilitas	-	-	1,464 Point				1,386 Point	-			
3	Persentase tingkat kemantapan jalan desa	-	-	36,69%				38,28%	-			
4	Persentase kemantapan jalan	-	57,92%		49,95%	52,61%	55,27%		-	52,61%	55,27%	
5	Cakupan air minum layak	100%	90,74%	84,00%	88,74%	89,27%	90,04%	85,08%	-	89,27%	90,04%	
6	Cakupan sanitasi layak	100%	68,53%	73,60%	67,27%	67,69%	68,11%	67,03%	-	67,69%	68,11%	
7	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	-	-	50,00%				48,29%	-			
8	Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi teknis	-	-	76,48%				74,32%	-			
9	Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi non teknis	-	-	73,84%				73,34%	-			
10	Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi	-	88,04%		76,83%	80,70%	84,40%		-	80,70%	84,40%	

No	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
11	Persentase penurunan waktu genangan air di perkotaan Garut	-	-	50,00%				43,33%	-			
12	Persentase penurunan titik rawan banjir	-	-	67,95%				67,35%	-			
13	Persentase penurunan luas genangan air	-	0%		60,00%	50,00%	25,00%		-	50,00%	25,00%	
14	Persentase tampungan air yang tersedia	-	-	20,00%	30,16%	57,14%	82,54%	6,93%	-	57,14%	82,54%	
15	Persentase bangunan ber IMB	-	-	34,00%				8,07%	-			
16	Persentase bangunan yang layak teknis	-	-	0,028%				0,05%	-			
17	Persentase bangunan gedung yang layak teknis dan fungsi	-	-		8,40%	8,92%	9,45%		-	8,92%	9,45%	
18	Persentase luas bangunan dan lingkungan yang tertata	-	-		6,00%	12,00%	20,00%		-	12,00%	20,00%	
19	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	-	-	82,50%	83,00%	83,50%	84,00%	82,50%	-	83,50%	84,00%	
20	Persentase tersedianya layanan rekomendasi IUJK	-	-	82,00%				82,69%	-			

No	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
21	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	-	-	8,50%	19,64%	23,44%	27,24%	8,33%	-	23,44%	27,24%	
22	Persentase data kajian litbang	-	-	30,00%				11,11%	-			
23	Persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi	-	-		100%	100%	100%		-	100,00%	100,00%	

**Tabel 2.3**  
**Realisasi Kinerja Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)		Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.403.000.000	1.976.000.000	2.277.000.000	1.780.000.000	94,76%	90,08%
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1.696.000.000	1.491.000.000	1.688.000.000	1.426.000.000	99,53%	95,64%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	205.000.000	-	201.000.000	-	98,05%	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	222.000.000	-	209.000.000	-	94,14%	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	262.000.000	119.000.000	258.000.000	119.000.000	98,47%	100,00%
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	132.006.000.000	23.174.000.000	79.543.000.000	20.416.000.000	60,26%	88,10%
7	Program Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten	-	97.526.000.000	-	94.266	-	96,66%

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)		Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
8	Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Desa	-	70.474.000.000	-	67.229.000.000	-	95,40%
9	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1.656.000.000	-	1.456.000.000	-	87,92%	-
10	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1.292.000.000	-	1.094.000.000	-	84,67%	-
11	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	20.536.000.000	-	20.500.000.000	-	99,82%	-
12	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	100.000.000	-	99.000.000	-	99,00%	-
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2.455.000.000	-	2.411.000.000	-	98,21%	-
14	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	54.786.000.000	82.192.000.000	51.746.000.000	78.056	94,45%	94,97%

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)		Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
15	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	4.829.000.000	-	4.706.000.000	-	97,45%	-
16	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1.400.000.000	33.496.000.000	1.392.000.000	32.432.000.000	99,43%	96,82%
17	Program Pengendalian Banjir	32.800.000.000	16.929.000.000	31.944.000.000	16.779.000.000	97,39%	99,11%
18	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	128.797.000.000	-	112.302.000.000	-	87,19%	-
19	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	-	64.469.000.000	-	61.597.000.000	-	95,55%
21	Program Perencanaan Tata Ruang	1.953.000.000	-	1.732.000.000	-	88,68%	-
22	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	233.000.000	2.121.000.000	233.000.000	1.926.000.000	100,00%	90,81%
23	Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	1.603.000.000	815.000.000	1.524.000.000	810.000.000	95,07%	99,39%
24	Program Pembangunan/ Peningkatan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum	-	9.283.000.000	-	7.741.000.000	-	83,39%

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)		Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
25	Program Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Gedung	-	297.000.000	-	294.000.000	-	98,99%
26	Program Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Bangunan	35.423.000.000	-	34.363.000.000	-	97,01%	-
27	Program Peningkatan Pelayanan Bantuan Teknis Tentang Perencanaan Penataan Bangunan	250.000.000	-	249.000.000	-	99,60%	-
28	Program Peningkatan Koordinasi dalam Pengendalian Pendataan Pengawasan Penertiban Bangunan	322.000.000	-	318.000.000	-	98,76%	-
<b>Jumlah</b>		<b>425.237.000.000</b>	<b>404.369.000.000</b>	<b>350.254.000.000</b>	<b>384.879.000.000</b>	<b>82,37%</b>	<b>95,18%</b>

### **a. Jaringan Jalan**

Kabupaten Garut yang memiliki luas wilayah administratif 3.074,07 Km<sup>2</sup>, sampai dengan tahun 2019 memiliki total jaringan jalan sepanjang 4.257,16 Km terdiri dari jalan nasional 30,08 Km, jalan provinsi 277,08 Km, jalan kabupaten 829 Km dan jalan desa 3.121 Km.

Tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2020 mengalami peningkatan sepanjang 17,32 km dari 656,66 km atau 79,21% pada tahun 2019 menjadi sepanjang 673,98 km atau 81,30% pada tahun 2020, apabila dibandingkan dengan target pencapaian tahun 2020, tingkat kemantapan kondisi jalan kabupaten mencapai 98,52% dari target sebesar 82,52%. Kondisi permukaan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2017, meliputi aspal sepanjang 235,66 km (28,43%), hotmix sepanjang 429,41 km (51,80%), jalan batu sepanjang 83,64 km (10,09%), dan beton sepanjang 80,29 km (9,69%).

Tingkat kemantapan jalan desa pada tahun 2020 mengalami peningkatan sepanjang 49,62 km dari 1.145,09 km pada tahun 2019 menjadi sepanjang 1.194,72 km atau 38,28% pada tahun 2020, apabila dibandingkan dengan target pencapaian tahun 2020, tingkat kemantapan kondisi jalan kabupaten mencapai 104,33% dari target sebesar 36,69%.

Total panjang jalan lingkungan sampai dengan tahun 2019 sepanjang 1.355 Km, kondisi jalan lingkungan dalam kondisi baik pada tahun 2020 mengalami peningkatan sepanjang 10,70 km dari 643,63 km pada tahun 2019 menjadi sepanjang 654,33 km atau 48,29% pada tahun 2020, apabila dibandingkan dengan target pencapaian tahun 2020, tingkat kemantapan kondisi jalan kabupaten mencapai 96,58% dari target sebesar 50%.

### **b. Sumber Daya Air**

Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi Teknis yang menjadi kewenangan pemerintah seluas 16.067 Ha dengan jumlah bangunan bendung utama 38 buah, bangunan air pelengkap 1.694 buah dan panjang saluran sekunder 230,476 Km. Kondisi saluran irigasi teknis kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 mencapai 73,07%, meningkat dari tahun 2019 yang mencapai 70,84%.

Jaringan irigasi desa merupakan jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa seluas 41.635 Ha bangunan air pelengkap 1.168 buah dan panjang saluran 1.681 Km. Kondisi saluran irigasi desa (non teknis) dalam kondisi baik pada tahun 2020 mencapai 73,34%, meningkat dari tahun 2019 yang mencapai 72,88%.

### c. Standar Pelayanan Minimal

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar sampai tahun 2020 meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah mencapai 81,27%, dan jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik telah mencapai 67,38%:

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum**  
**Tahun 2015-2020**

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi (%)					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	61,52	69,00	73,15	76,00	79,84	81,27
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	56,59	59,80	62,20	64,60	66,73	67,38

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, karena memiliki dampak yang signifikan dimasa datang. Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Isu strategis pembangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya, sehingga identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dalam upaya mencapai visi dan misi sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan daerah dapat dioperasionalkan serta secara moral maupun etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

### 2.3.1 Permasalahan Pokok

#### a. Permasalahan urusan pekerjaan umum:

- 1) Kemantapan jalan belum mencapai target.

Rendahnya kemantapan jalan terjadi oleh beberapa hal, antara lain:

- a) belum optimalnya pemeliharaan jalan dan kelengkapan jalan seperti drainase;
- b) rendahnya kualitas konstruksi;
- c) belum fungsionalnya jalan-jalan baru;
- d) masih terbatasnya kapasitas jalan menuju destinasi wisata;
- e) masih terbatasnya kapasitas jalan menuju kawasan sentra pertanian;
- f) masih terbatasnya kapasitas jalan menuju kawasan sentra ekonomi produktif lainnya.

- 2) Masih rendahnya dukungan sektor irigasi terhadap peningkatan produksi pertanian.

Dampak dan dukungan sektor irigasi terhadap peningkatan produksi pertanian masih rendah, terjadi oleh beberapa hal, antara lain:

- a) belum optimalnya upaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten;
- b) belum optimalnya rehabilitasi jaringan irigasi kabupaten, terutama dalam menentukan lokasi prioritas;
- c) pengendalian ruang dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

- 3) Tingkat akses air minum belum mencapai target.

Tingkat capaian akses air minum masih rendah dibandingkan dengan target *universal acces* sebesar 100%, terjadi oleh beberapa hal, antara lain:

- a) pengelolaan pasca pembangunan tidak optimal, bahkan dalam beberapa kasus tidak dilakukan;
- b) belum dilakukan potensi menjalin kerjasama dengan non pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Tingginya ketergantungan terhadap pembiayaan pemerintah menyebabkan tidak optimalnya kualitas pembangunan maupun kuantitas sumber air minum dan sanitasi;
- c) belum optimalnya upaya perlindungan terhadap sumber air untuk kebutuhan air baku;
- d) belum optimalnya kinerja kelembagaan pengelolaan air minum. baik segi sumber daya manusia maupun keandalan suatu kelembagaan tersebut;

- e) belum memiliki lokasi prioritas dalam rencana pembangunan. Ada kalanya masih dilakukan *by project* tanpa dilakukan studi awal yang matang disesuaikan dengan kondisi lahan dan keterkaitan dengan sektor lainnya;
  - f) masih rendahnya kualitas air baku dan tidak meratanya kuantitas dan ketersediaan air baku.
- 4) Tingkat akses sanitasi belum mencapai target.

Tingkat capaian akses sanitasi masih rendah dibandingkan dengan target *universal acces* sebesar 100%, terjadi oleh beberapa hal, antara lain:

- a) masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah;
  - b) belum berorientasi pada pengelolaan limbah skala kawasan;
  - c) angka BABS masih tinggi;
  - d) belum ada regulasi pengelolaan air limbah di tingkat kabupaten;
  - e) belum ada unit kerja khusus untuk pengelolaan air limbah.
- 5) Meningkatnya lokasi titik genangan dan banjir perkotaan.

Mulai pesatnya pembangunan di Kabupaten Garut khususnya wilayahnya perkotaan terkadang tidak diiringi dengan pembangunan ruang terbuka hijau, perbaikan saluran dan pengelolaan persampahan, hal tersebut adakalanya menyebabkan mulai seringnya terjadi banjir perkotaan yang durasinya cukup lama walau curah hujan tidak terlalu tinggi. Selain hal tadi juga disebabkan oleh:

- a) belum optimalnya sistem drainase perkotaan;
  - b) belum optimalnya upaya mengurangi *run off* pada kawasan terbangun;
  - c) pengendalian ruang dan perizinan bangunan belum optimal dalam mengurangi *run off*.
- 6) Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan.

Hal lain yang menyebabkan penataan bangunan dan lingkungan belum optimal yaitu:

- a) masih banyaknya bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b) belum optimalnya penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- c) masih rendahnya penerapan arsitektural bangunan gedung khas Kabupaten Garut;
- d) masih rendahnya kualitas bangunan gedung pemerintah, yang akan digunakan sebagai percontohan bangunan gedung yang laik fungsi;

- e) masih adanya bangunan gedung pemerintah yang belum fungsional.
- 7) Manajemen pelaksanaan konstruksi masih rendah.

Sebagai *quality control* untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Namun hal ini kadang abai dilakukan sehingga terjadi permasalahan seperti gagal lelang, terlambatnya pekerjaan, lemahnya pengawasan di lapangan, sampai rendahnya kualitas pekerjaan yang dapat berakibat berurusan dengan masalah hukum.

**b. Permasalahan urusan penataan ruang:**

- 1) Belum optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang;
- 2) Belum optimalnya fungsi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Garut;
- 3) Belum tersedianya aspek legal (Perda) terkait Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang;
- 4) Belum adanya SDM Aparatur untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dalam hal ini belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Berdasarkan telaahan dari beberapa permasalahan tersebut di atas maka hal-hal yang menjadi isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

- 1. Peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- 2. Peningkatan konektivitas antarwilayah;
- 3. Pembangunan jalan baru;
- 4. Peningkatan kemantapan jalan;
- 5. Peningkatan kemantapan jaringan irigasi;
- 6. Peningkatan cakupan layanan air minum;
- 7. Peningkatan cakupan layanan sanitasi;
- 8. Peningkatan pengendalian banjir;
- 9. Peningkatan pengendalian bangunan gedung; dan
- 10. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.

**2.3.2 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Sedangkan kerangka pikir penyusunan strategi tersebut mempertimbangkan sinergisme antara tiga faktor utama pembangunan, yaitu:

- (1) sektor unggulan (prioritas pembangunan);
- (2) kondisi eksisting masing-masing wilayah pembangunan; dan
- (3) bidang masalah yang akan ditangani.

Berdasarkan hasil analisis, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

- (1) struktur organisasi yang sangat memadai;
- (2) cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- (3) kapasitas SDM baik dari jumlah, kemampuan maupun pengalaman yang dimiliki;
- (4) fasilitas yang dimiliki;
- (5) anggaran yang dikelola;
- (6) hasil dari pembangunan infrastruktur yang telah dimanfaatkan masyarakat; serta
- (7) keterpaduan/interaksi dengan *stakeholders* yang sudah semakin meningkat.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan yang baik dengan meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM, memantapkan kelembagaan dan peran fungsi UPT dalam mendukung program dan kegiatan dinas, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka kondisi yang diinginkan antara lain:

1. Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM terhadap penguasaan keahlian (*skill*) yang sesuai tugas pokok dan fungsi;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, irigasi dan Sumber daya air lainnya, bangunan, dan pengelolaan air minum dan sanitasi;
3. Meningkatnya pemenuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan;
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan;
5. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sumber daya air berbasis partisipasi pemilik kepentingan;

6. Meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi kelayakan teknis, fungsi dan administrasi;
7. Meningkatnya akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas sanitasi masyarakat;
8. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun dalam pembiayaannya;
9. Meningkatnya keterpaduan penanganan infrastruktur; dan
10. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang.

### **2.3.3 Rekomendasi dan Catatan Strategis**

Dengan menelaah hal tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didorong untuk melakukan analisis keterkaitan antar faktor-faktor pendukung dengan menerapkan 4 (empat) strategi (Strategi SO, Strategi WO, Strategi ST, Strategi WT).

- (1) Strategi SO (*comparative advantage strategy*)  
Merupakan strategi yang mengandalkan kekuatan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meraih peluang yang ada.
- (2) Strategi WO (*investment on weakness strategy*)  
Merupakan strategi untuk meraih peluang dengan cara mengatasi kelemahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, misalnya dengan melakukan kegiatan besar-besaran untuk mengatasi kelemahan dan mengubahnya menjadi kekuatan sehingga dapat meraih peluang.
- (3) Strategi ST (*mobilization strategy*)  
Strategi memobilisasi kekuatan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mengatasi hambatan/ancaman.
- (4) Strategi WT (*damage control strategy*)  
Merupakan strategi meminimumkan kerusakan (*damage*) sehingga dampak yang terjadi tidak mengancam eksistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### **2.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat**

Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan yang *komprehensif* dan terintegrasi, penyusunan rencana kerja mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Nasional serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 antara lain:

- PN1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- PN2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- PN3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- PN4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- PN5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- PN6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- PN7 : Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan layanan infrastruktur dasar melalui:
  - (a) Memulihkan industri perumahan, antara lain melalui subsidi/bantuan perumahan dan relaksasi pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta melanjutkan perluasan akses masyarakat terhadap perumahan permukiman layak dan terjangkau;
  - (b) Menyediakan infrastruktur dasar permukiman termasuk air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan pengelolaan sampah);
  - (c) Menyediakan akses air minum aman yang difokuskan pada rencana pengamanan dan pengawasan kualitas air minum, serta akses sanitasi aman dan pengelolaan sampah yang berfokus kepada pengembangan sambungan rumah yang terhubung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD), pengembangan layanan lumpur tinja, dan pengelolaan sampah khususnya melalui upaya 3R (*reduce, reuse, recycle*) untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan;

- (d) Meningkatkan ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan dengan difokuskan pada optimalisasi kapasitas SPAM yang sudah terpasang, serta penyediaan akses air minum untuk daerah kepulauan, kawasan perbatasan, daerah rawan air, dan daerah prioritas nasional lainnya;
- (e) Mendorong percepatan penyediaan akses air minum dan sanitasi aman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah serta penyelenggara air minum dan sanitasi, baik dari sisi perencanaan, teknis, pengamanan kualitas air minum, dan strategi pendanaan;
- (f) Peningkatan kinerja keamanan dan keselamatan transportasi serta pencarian dan pertolongan melalui (1) pelaksanaan 5 Pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) termasuk penganganan integrasi data dan sistem informasi, penanganan lokasi rawan kecelakaan (*blackspot*) melalui penanganan infrastruktur jalan dan penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan, penyediaan fasilitas jembatan timbang, serta penerapan regulasi untuk mengatasi kelebihan dimensi dan muatan angkutan jalan; (2) penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi termasuk penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran; (3) peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM, pemenuhan dan kelaikan sarana dan prasarana di bidang pencarian dan pertolongan;
- (g) Meningkatkan ketersediaan dan keamanan air melalui (1) pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur penyedia air, (2) peningkatan pengelolaan dan efisiensi sumber daya air, serta (3) konservasi dan pengendalian kerusakan dan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menjaga sumber air;
- (h) Meningkatkan layanan dan efisiensi sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan dan peningkatan (termasuk penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi), rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, serta modernisasi irigasi (melalui pemantauan pemakaian air dan peningkatan kelembagaan);

- (i) Meningkatkan ketahanan bencana melalui perencanaan terpadu dan penyediaan infrastruktur kebencanaan berbasis kewilayahan yang diprioritaskan pada daerah pascabencana, wilayah perkotaan, serta kawasan ekonomi dan strategis, termasuk pusat-pusat pariwisata;
  - (j) Memberikan dukungan program pemulihan ekonomi dengan skema padat karya misalnya untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, pembangunan drainase, rehabilitasi sistem irigasi, termasuk pelaksanaan P3TGAI.
- (2) Peningkatan konektivitas nasional dan pengembangan angkutan umum massal di perkotaan dengan:
- (a) Membangun jalan nasional dan jalan bebas hambatan pada koridor utama ekonomi yang terintegrasi dengan simpul transportasi;
  - (b) Pembangunan/peningkatan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi (antarmoda dan multimoda) termasuk penguatan jaringan kereta api pada koridor logistik utama;
  - (c) Standarisasi kinerja pelabuhan simpul peti kemas domestik pada pelabuhan utama dan penyediaan layanan tol laut bersubsidi;
  - (d) Penguatan hub bandara dan peningkatan kapasitas airside serta aktivasi jaringan hub and spoke;
  - (e) Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur terbangun dan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mendukung sektor pariwisata, industri dan kegiatan ekonomi strategis lainnya;
  - (f) Menyusun Rencana Mobilitas Perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan (*Urban Mobility Plan*), pengembangan Otoritas Transportasi Perkotaan Metropolitan, serta mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan untuk pembangunan angkutan massal perkotaan, termasuk di dalamnya tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan mengoptimalkan kontribusi Badan Usaha dan pengembangan skema dukungan Pemerintah Pusat. Terutama dalam rangka implementasi Major Project sistem angkutan umum massal perkotaan di enam wilayah metropolitan;

- (g) Memberikan subsidi angkutan umum massal antara lain melalui skema *Buy the Service (BTS)* dan *Public Service Obligation (PSO)*;
  - (h) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada layanan transportasi dengan tertib dan konsisten.
- (3) Perluasan akses masyarakat terhadap energi dan tenaga listrik dengan:
- (a) Memberikan stimulus tarif listrik untuk meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan rentan;
  - (b) Membangun infrastruktur minyak dan gas bumi seperti jaringan gas kota untuk rumah tangga;
  - (c) Membangun infrastruktur energi terbarukan dan konservasi energi salah satunya untuk mendukung elektrifikasi;
  - (d) Optimalisasi penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi melalui fasilitasi pelaksanaan BBM satu harga dan fasilitasi percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi; dan
  - (e) Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan antara pemerintah pusat, daerah, serta badan usaha.
- (4) Pemberian dukungan untuk percepatan transformasi digital dengan:
- (a) Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK, terutama pada daerah nonkomersil dalam rangka penyediaan layanan publik, pertumbuhan sektor pariwisata, industri dan kegiatan ekonomi strategis lainnya;
  - (b) Mendorong penggunaan pusat data nasional dan aplikasi umum secara berbagi pakai antara pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha; dan
  - (c) Mendorong percepatan adopsi digital pada sektor-sektor strategis seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri, pariwisata dan sektor lainnya, melalui percepatan pembangunan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM digital, keamanan informasi dan kesiapan industri dalam negeri.

Prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023. Adapun prioritas pembangunan Jawa Barat sebagai berikut:

- PP1 : Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
- PP2 : Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
- PP3 : Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
- PP4 : Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
- PP5 : Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
- PP6 : Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
- PP7 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
- PP8 : Gerakan Membangun Desa;
- PP9 : Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
- PP10 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- PP11 : Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Barat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok;
- 2) Membangun sarana dan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial;
- 3) Memperkuat infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara;
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang;
- 6) Meningkatkan pengelolaan limbah domestik;
- 7) Meningkatkan kelestarian dan perlindungan terhadap Sumber Daya Air;
- 8) Meningkatkan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian;
- 9) Meningkatkan kinerja jaringan irigasi.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Garut**

Review terhadap rancangan awal RKPD ditujukan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD ini, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD sebagai berikut:

## **2.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Telaah usulan program dan kegiatan ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat langsung atau melalui pelaksanaan musrenbang.

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>				
	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1 Embung Kp. Sawah Pendeuy RT. 03 RW. 03 Ds. Cisangkal Kec. Cihurip	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun	4 Unit	
		2 Embung Kp. Malati RT 02 RW 08 Ds. Padasuka Kec. Pasirwangi			
		3 Embung Desa Kadongdong Ds. Kadongdong Kec. Banjarwangi			
		4 Embung Puncak Gunung Batulayang Kec. Malangbong			
2	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1 RW. 01 - RW. 11 Desa Citangtu Kec. Pangatikan	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dibangun	60 Unit	
		2 Kp. Warutilu RW. 04 Desa Ciburial Kec. Leles			
		3 Perum Putri Dinar Rw 13/ Ds Tanjungkamuning Kec Tarogong Kaler			
		4 Kp. Mekarmulya RT 01 RW 02 Desa Mulyajaya Kec. Banjarwangi			
		5 Kp. Cinangsi RW 14 Ds. Cibunar Kec. Cibatu			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		6 Kp. Cibojong rt 03 rt 05 ds balewangi kec. Cisurupan			
		7 Kp. Bojongsalam Rt/Rw 02/04 Kadungora, Karangtengah			
		8 Kp. Gosali RW 03 Bl. Limbangan, Ciwangi			
		9 Kp. Karangsari Rw.01 Leuwigoong, Karangsari			
		10 Kp. Cilerang Cibiuk, Cibiuk Kidul			
		11 Kp Sindang Serang Bayongbong, Ciburuy			
		12 Kp. Citamiang Bl. Limbangan, Pasirwaru			
		13 Kp. Cisumur Bl. Limbangan, Simpen Kaler			
		14 kp bojong gedang 03/03 Sukawening, Maripari			
		15 Kp Babakan Gunung Bodas RT 02 RW 01, Kab. Garut			
		16 Kp. Kiaralawang 003/003 Bayongbong, Cikedokan			
		17 Kp. Pananggungan RT/RW 001/007 Karangpawitan, Lengkongjaya			
		18 Kp. Tegalkiang Rt/Rw.03/08 Sukawening, Sukawening			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		19 Kp Babakan Nyampai Rt 003 Rw 008 Kersamanah, Mekarraya			
		20 Kp Babakan Rt 01 Bl. Limbangan, Limbangan Barat			
		21 Kp. Cidatar Kaler Rw. 06 Cisurupan, Cidatar			
		22 Rt 01/Rw 07 Selaawi, Cigawir			
		23 kp babakan jati rw 07 Sukamerang			
		24 kp babakan pasir malang rt 04/rw 04 Malangbong, Campaka			
		25 kp cipatik rw 03 Kersamanah, Nanjungjaya			
		26 kp cihanja tr 01/rw 01 Cibiuk, Lingkungpasir			
		27 kp cijolang rw 02 Bl. Limbangan, Cijolang			
		28 kp cipatik rw 02 Kersamanah, Nanjungjaya			
		29 kp lio Barat rw 06 Bl. Limbangan, Limbangan Barat			
		30 kp manjah beurem rw 11 Bl. Limbangan, Ciwangi			
		31 kp sasak beusi/perum puri kulsum Bl. Limbangan, Limbangan Timur			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		32 kp sudi rw 10 Bl. Limbangan, Cijolang			
		33 kp nagrak rt 02 rw 07 Selaawi, Mekarsari			
		34 rw 10 Bl. Limbangan, Limbangan Timur			
		35 rw 11 Cibatu, Sindangsuka			
		36 kp cikaso rt 01 rw 06 Selaawi, Cigawir			
		37 kp citamiang rw 09 Bl. Limbangan, Pasirwaru			
		38 KP. SITU CIPANAS, DESA RANCABANGO Tarogong Kaler, Rancabango			
		39 KP. NEGLA RW 06 Tarogong Kaler, Pananjung			
		40 Kp. Kubang RT 01 RW 05 Cisurupan, Sirnagalih			
		41 Desa Sukahurip Cigedug, Sukahurip			
		42 RT/ RW 001/006 Kampung Godog Desa Karangpawitan, Lebakagung			
		43 Kp. Cihuni Rt/Rw 003/005 Pangatikan, Cihuni			
		44 Kp. Cikole Rt/Rw 003/002 Wanaraja, Wanasari			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		45 Kp. Galumpit Sasak Rt/Rw 005/001 Garut Kota, Margawati			
		46 Kp. Pasangrahan Rt/Rw 00/002 Sukawening, Pasangrahan			
		47 Kp.Sukaraja RW.02 Karangpawitan, Jatisari			
		48 Kp Serut Rt 001 Rw 005 Bl. Limbangan, Pasirwaru			
		49 kp cisasak rt 01 rw 11 Pakenjeng, Depok			
		50 Kp. Kuyambut Tarogong Kaler, Tanjung Kamuning			
		51 Perum Oma Indah Rt 01 Rw 09 Karangpawitan, Godog			
		52 Kp.Cihaur Rt 02 Rw 09 Karangpawitan, Lebakagung			
		53 Kp.Singangpalay Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa			
		54 Kp.Neglasari RW 10 Sukawening, Sukasono			
		55 Kp. Bebedahan Rw 01 Rt 01 Ds Ciburuy Kec. Bayongbong			
		56 Kp Pasangrahan RT 01/01 Sukawening, Pasangrahan			
		57 Kp Cilemah RT 1 RW 3 Desa Cintaasih Samarang, Cintaasih			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		58 Kp. Babakan jati Sukawening, Maripari			
		59 Kp. Dangiing Cilawu, Dangiing			
		60 Kp. Kostarea 2, RT 02/RW 03 Sukawening, Mekarluhyu			
3	Pembangunan Tanggul Sungai	1 Sub DAS Cipaligaran	Panjang tanggul yang dibangun	0.24 Km	
		2 Sub DAS Solokaso			
		3 Sub DAS Kp. Rahong RW 03 Ds. Wangunjaya Kec. Banjarwangi			
		4 Sub DAS kp. cikalong, Kab. Garut, Cibalong, Mekar Mukti			
		5 Sub DAS Ciroyom, Kab. Garut, Samarang, Cintarakyat			
		6 Sub DAS Cidahu, Kab. Garut, Cikelet, Girimukti			
		7 Sub DAS kp. sawah loa rw 07, Kab. Garut, Cikelet, Linggamanik			
		8 Sub DAS Cikamiri Blok Qurotaayun, Kab. Garut, Samarang, Sirnasari			
		9 Sub DAS Sungai Kampung Cibentang, Kab. Garut, Caringin, Sukarame			
		10 Sub DAS Kampung Bantar Warung RW 03, Kab. Garut, Cisompet, Sukanagara			
		11 Sub DAS ciroyom, Kab. Garut, Samarang, Cintarakyat			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
4	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	1 Pembangunan Polder/Kolam Retensi Cirumput Kec. Garut Kota	Luas/panjang kolam retensi yang dibangun	0,30 Km	
	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1 Jaringan Irigasi Kp. Cilejet Desa Sukarame Kec. Bayongbong	Panjang jaringan irigasi yang direhab	4,94 Km	
		2 Jaringan Irigasi Kp Batara Desa Sukarame Kec. Bayongbong			
		3 Jaringan Irigasi Narongtong Desa Mekarsari Kec. Bayongbong			
		4 Jaringan Irigasi Kp. Cihuni Desa Cihuni Kec. Pangatikan			
		5 Jaringan Irigasi Kp Haurkuning Rt/Rw 02/12 Haur Kuning Kec. Kadungora			
		6 Jaringan Irigasi Tanjungsari Kec. Karangpawitan			
		7 Jaringan Irigasi Blok Sawah Cipacing Kp. Negla Ds. Sindangsari Kec. Leuwigoong			
		8 Jaringan Irigasi Damparit Kelompok Tani Mekartani 6 Kp. Sindang Asih Desa Pangrumasan Kec. Peundeuy			
		9 Jaringan Irigasi Citespong Kec. Cilawu			
		10 Jaringan irigasi Kp. Pintuan RW.10 Ds. Karang Mulya Kec. Kadungora			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		11 Jaringan irigasi Kp. Cilageni RW.05 Ds.Karang Mulya Kec. Kadungora			
		12 Jaringan irigasi Blok Cibungur Ds. Rancabango Kec. Tarogong Kaler			
		13 Jaringan irigasi Cimaja Ds. Majasari Kec. Cibiuk			
		14 Jaringan Irigasi Kp. Cibeunying Rt 03 Rw 01 Malangbong, Mekarmulya			
		15 Jaringan Irigasi Irigasi Batununjul Selaawi, Pelitaasih			
		16 Jaringan Irigasi Desa Surabaya, Kab. Garut			
		17 Jaringan Irigasi Kp. Ancol Bl. Limbangan, Simpen Kaler			
		18 Jaringan Irigasi Kp. Cimerang Burujul Garut Kota, Cimuncang			
		19 Jaringan Irigasi Kampung Pamoyanan RW 05 Pakenjeng, Panyindangan			
		20 Jaringan Irigasi Kp. Sukanegla Garut Kota, Sukanegla			
		21 Jaringan Irigasi Saluran Kubang Kp Cukang Kawung RT 1 RW 6 Tarogong Kaler, Sirnajaya			
		22 Jaringan Irigasi Kampung Rahayu Rw 01 Pakenjeng, Pasirlangu			
		23 Jaringan Irigasi Kp. Cidodot Kadungora, Kadungora			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		24 Jaringan Irigasi Blok Cikole Cihurip, Cihurip			
		25 Jaringan Irigasi kp. cisarua Cisompet, Neglasari			
		26 Jaringan Irigasi Desa Sukarasa Samarang, Sukarasa			
		27 Jaringan Irigasi blok kayujati Kp. Sirnasari Samarang, Sirnasari			
		28 Jaringan Irigasi Kp Caringin Karangpawitan, Tanjungsari			
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1 38 Daerah Irigasi Teknis	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	95,22 Km	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>				
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Sukajadi Kec. Tarogong Kaler	Jumlah rumah tangga terlayani/terpasang jaringan perpipaan	880 SR	
		2 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Situsari Kec. Karangpawitan			
		3 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Sirnagalih Kec. Cisurupan			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		4 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Pasirkiamis Kec. Pasirwangi			
		5 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Karang Sari Kec. Karangpawitan			
		6 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Kutanagara Kec. Malangbong			
		7 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Karanganyar Kec. Leuwigoong			
		8 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Karang Sari Kec. Leuwigoong			
		9 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Sirnasari Kec. Samarang			
		10 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Salamnunggal Kec. Leles			
		11 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Kp. Mulyasarai RT. 02 RW. 02 Desa Cihurip Kec. Cihurip			
		12 Perluasan Saluran Air Bersih RW. 03 RW. 04 RW. 05 Desa Babakanloa Kec. Pangatikan			
		13 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan kp gadog RT/RW 004/004, Kab. Garut, Sukawening, Sukawening			
		14 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Kampung kuta RW 02, Kab. Garut, Sukaresmi, Mekarjaya			
		15 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Kampung Cileuleuy rw 06, Kab. Garut, Cikajang, Simpang			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		16 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Kp Cileleuy RT005 RW006, Kab. Garut, Cikajang, Simpang			
		17 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Ciburial RW 04, Kab. Garut, Leles, Ciburial			
		18 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Kp. Palalargon RT. 01 RW. 05, Kab. Garut, Cisarupan, Cisarupan			
		19 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan KP. BANTARBEAS, Kab. Garut, Bayongbong, Sukasenang			
		20 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan KP. KIARALAWANG, Kab. Garut, Bayongbong, Cikedokan			
		21 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Kp. Leuceun RT. 01 RW. 03, Kab. Garut, Samarang, Cintarasa			
		22 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Kp. Cicayur, Kab. Garut, Cigedug, Cintanagara			
		23 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Kp Cigawir, Kab. Garut, Selaawi, Cigawir			
		24 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Kp. Cireundeu Panjang, Kab. Garut, Karangpawitan, Tanjungsari			
		25 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Kp Cijambe RT/RW 01/06, Kab. Garut, Bl. Limbangan, Limbangan Tengah			
		26 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Kp. Cijambe, Kab. Garut, Bl. Limbangan, Limbangan Tengah			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		27 Pembangunan SPAM Baru Jaringan Perpipaan Ds. Karyajaya Kec. Bayongbong			
		28 Pembangunan SPAM Baru Jaringan Perpipaan Ds. Sukaluyu Kec. Sukawening			
		29 Pembangunan SPAM Baru Jaringan Perpipaan Ds. Bunisari Kec. Malangbong			
		30 Pembangunan SPAM Baru Jaringan Perpipaan Ds. Sukanagara Kec. Peundeuy			
		31 Pembangunan SPAM Baru Jaringan Perpipaan Ds. Citeras Kec. Malangbong			
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1 Kp Mularajeun RW 02, Kab. Garut, Cilawu, Mekarmukti	Jumlah rumah tangga terlayani/terpasang jaringan perpipaan	875 SR	
		2 Kp Babakan Sukasari RW 14, Kab. Garut, Cilawu, Mekarmukti			
		3 RW 02, RW 05, RW 06, RW 07, RW 08, RW 09, RW 10, RW 11, RW 12, RW 13,, Kab. Garut, Karangpawitan, Situgede			
		4 Kp. Ciuda RW 010, Kab. Garut, Cibalong, Sagara			
		5 Kp. Baru RW 05, Kab. Garut, Cisurupan, Sirnajaya			
		6 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Kanajahan Ds. Bayongbong Kec. Bayongbong			
		7 Pengadaan pipa HDPE 2" Untuk msyarakat miskin Kab. Garut			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>				
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1 Pembangunan MCK dan Septik tank komunal RW.21 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota	Jumlah rumah tangga yang berakses sub sistem pengolahan setempat	1635 RT/KK	
		2 Pembangunan MCK dan Septik tank komunal Desa Jangkurang Kec. Leles			
		3 Pembangunan MCK dan Septik tank komunal Kp. Bentar hilir RW.10 Kel. Sukamentri Kec. Garut Kota			
		4 Pembangunan MCK dan Septik tank komunal Desa Jagabaya Kec. Mekarmukti			
		5 Pembangunan MCK dan Septik tank komunal Desa Cijayana Kec. Mekarmukti			
		6 Pembangunan MCK dan Septik tank komunal Desa Padahurip Kec. Banjarwangi			
		7 Pembangunan MCK dan Septik tank komunal Desa Sirnagalih Kec. Bayongbong			
		8 Pembangunan MCK dan Septik tank komunal Desa Sindangsari Kec. Cigedug			
		9 Pembangunan MCK dan Septik tank komunal Desa Citeras Kec. Malangbong			
		10 Pembangunan MCK dan Septik tank komunal Desa Barudua Kec. Malangbong			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		11 Pembangunan MCK dan Septik tank komunal Desa Jatiwangi Kec. Pakenjeng			
		12 Pembangunan MCK dan Septik tank komunal RW.06,09,10,11,12 & 13 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler			
		13 Pembangunan MCK dan Septik tank komunal Kp Jolok RW.08 dan Kp Cibogobodas RW.09 Desa Mekarmukti Kec. Cilawu			
		14 Pembangunan MCK dan Septik tank komunal Kp. Warutilu RW. 04 Desa Ciburial Kec. Leles			
		15 Pembangunan MCK RW 12 Kp. Pasir Seah Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul			
		16 Pembangunan MCK RW 11 Kp. Panawuan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul			
		17 Pembangunan MCK RW 05 Kp. Astana Girang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul			
		18 Pembangunan MCK Mesjid Annur Kp Puncak RT 02 RW 02 Ds Saribakti Kec Peundeuy			
		19 Pembangunan MCK RW 15 Kp. Cipangsor Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul			
		20 Pembangunan MCK Kp. Pasirucing RT 01 RW 05 Desa Mekartani Kecamatan Singajaya			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>				
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1 Jalan Mustopa Kamil - Holcim - Perempatan Cendana	Panjang drainase perkotaan yang direhab	1,04 Km	
		2 Simpang Papandayan - Ciledug - A. Yani - Cikendi			
		3 Sistem Copong			
		4 Blok SOR Ciateul			
2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1 Kp. Bebedahan Ds. Sukasenang Kec. Banyuresmi	Panjang drainase lingkungan yang dibangun	7,40 Km	
		2 Kp. Tegallega RW.002 dan Kp. Pangkalan RW. 10 Ds. Langensari Kec. Tarogong Kaler			
		3 Jalan Ngotong - Warung Cendol RW.005 dan RW.12 Ds. Rancabango Kec. Tarogong Kaler			
		4 RW.1 s/d RW.11 Ds. Karangmulya Kec. Karangpawitan			
		5 RW.01 - 013 Ds. Pananjung Kec. Tarogong Kaler			
		6 Blok Sinapeul dan Blok Sawah Tengah Kel. Sukakarya Kec Tarogong Kidul			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		7 RW.01 sampai dengan RW.19 Kel. Jayawaras Kec. Tarogong Kidul			
		8 Kp. Cilanjung Ds. Selaawi Kec. Selaawi			
		9 Kp. Lewo RT.01 RW. 01 Ds. Sukarasa Kec. Malangbong			
		10 Kp. Bojong Peuntas Ds. Pasirkiamis Kec. Pasirwangi			
		11 Kp. Bojongsari Ds. Karang Sari Kec. Karangpawitan			
		12 Kp. Babakan Cilamo Ds. Girimukti Kec. Cibatuh			
		13 RW.05 Ds. Sakawayana Kec. Malangbong			
		14 Kp. Nangsi Ds. Mekarbakti Kec. Kadungora			
		15 Pasopati Dusun 3 Ds. Haruman Kec. Leles			
		16 Kp. Cihaneut RW.04 Ds. Mekarbakti Kec. Kadungora			
		17 Kp. Sindang Anom Ds. Limbangan Barat Kec. Limbangan			
		18 Desa Limbangan Barat Kec. Limbangan			
		19 Kp. Babakan Bangbayang RW.09 Ds. Mekarsari Kec. Cibalong			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		20 Kp. Tegalawi RW.08 Ds. Sukamukti Kec. Sukawening			
		21 Kp. Ciharashas RW.03 Ds. Cikarang Kec. Malangbong			
		22 RW 06 Kampung Cikalong Ds. Tanjungsari Kec. Karangpawitan			
		23 RW.09 Kampung Cogreg Lebak Ds. Tanjungsari Kec. Karangpawitan			
		24 Kp. Sukamulya Dayeuh Manggung, RW.08 Ds. Dayeuhmanggung Kec. Cilawu			
		25 Kp. Ciawi Kepuh RT/RW 01/08 Ds. Majasari Kec, Cibiuk			
		26 RT/RW 04/01 Ds. Sindangsuka Kec. Cibatu			
		27 Ds. Maripari Kec. Sukawening			
		28 Kp. Maja Ds. Cipareuan Kec. Cibiuk			
		29 Kp. Kombongan RT.02 RW.03 Pamulihan - Pakenjeng			
		30 Kp. Lio RW.06 Ds. Sukalaksana Kec. Banyuresmi			
		31 Kp. Sadangayah RW.10 Ds. Sukamanah Kec. Bayongbong			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
V	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>				
	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>				
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Lapangan Sepak Bola dan Gedung Aquatic	Jumlah bangunan gedung daerah yang terbangun	2 Unit	
VI	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>				
	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Penataan Pedestrian Jalan Bank	Luas bangunan dan lingkungan yang ditata	757,60 M2	
		2 Penataan Pedestrian Jalan Veteran			
		3 Pembangunan Mesjid Nurul Hidayahah Kp. Cibodas Pasantren Rt 02 Rw 03 Ds Banjarsari Kec. Bayongbong			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>				
	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>				
1	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1 Pembebasan lahan lingkaran cipanas	Panjang lahan/tanah yang dibebaskan	17,50 Km	
		2 Pembebasan Tanah Jalan Cisangkal - Jatisari			
		3 Pembebasan Tanah Cipicung - Banyuresmi			
		4 Pembebasan Lahan Garut Sucinaraja Wanaraja			
		5 Pembebasan Lahan Simpen - Ciwangi - Nagreg			
		6 Pembebasan Lahan / Tanah Jalan Kadungora - Leles			
		7 Pembebasan Lahan/Tanah Jalan Tarogong - Gandasari -Cimaragas			
2	Pembangunan Jalan	1 Pembangunan Jalan By Pass II (STA. 0+000 - STA. 2+000)	Panjang badan jalan baru yang terbangun	45,35 Km	
		2 Pembangunan Jalan Desa Kp. Hegar Ds. Mekarmukti Kec. Cibalong - Ds. Jatisari Kec. Cisompet			
		3 Pembangunan Jalan Desa Pangrumasan (Pangrumasan - Purwajaya)			
		4 Pembangunan Jalan Desa Neglasari - Margamulya Cisompet			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		5 Pembangunan Jalan Coblosan - Taneuh Beureum Ds. Mekarsewu Kec. Cisewu			
		6 Pembangunan Jalan Toblong - Purwajaya Kec. Peundeuy			
		7 Pembangunan Jalan Girimukti Kec. Cisewu			
		8 Pembangunan Jalan Ciwangi - Simpen - Nagreg Kec. Limbangan			
		9 Pembangunan Jalan Ds. Cintamanik Kec.Karangtengah - Ds. Barudua Kec. Malangbong			
		10 Pembangunan Jalan Ds. Cisangkal Kec. Cihurip - Ds. Jatisari Kec. Cisompet			
		11 Pembangunan Jalan Desa Tenjonagara - Parentas Kec. Sucinaraja (batas tasik)			
		12 Pembangunan Jalan Penclut Ds. Cikondang Kec. Cisompet - Gunung Peer Ds. Sagara Kec. Cisompet			
		13 Pembangunan Jalan Pelita asih - Kareumbi Kec. Limbangan			
		14 Pemb Jalan Kampung Hegar - Cikapundung Cikondang Cisompet			
		15 Pemb. Jalan Karaha - Kp. Cukang Desa Cinta			
3	Rekonstruksi Jalan	1 Rekontruksi Jalan Kadungora - Leles	Panjang jalan yang direkonstruksi	53,13 Km	
		2 Rekontruksi Jalan Lingkar Luar Leles			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		3 Rekonstruksi Jalan Wanaraja- Talaga Bodas - Puncak Piramid			
		4 Rekonstruksi Jalan Garut - Karangpawitan - Wanaraja - Cihuni - Cibatu			
		5 Rekonstruksi Jalan RSU			
		6 Rekonstruksi Jalan Tarogong - Samarang			
		7 Rekonstruksi Jalan Garumukti - Cicembang - Pangradegan- Wates - Gunung Jampang			
		8 Rekonstruksi Jalan Panawa - Leuweung Panjang - Pangradegan			
		9 Rekonstruksi Jalan Jayamukti - Cisangkal			
		10 Rekonstruksi Jalan Cigawir-Putrajawa-Samida-Pelitaasih			
		11 Rekonstruksi Jalan Akses Wisata Cangkuang			
		12 Rekonstruksi Penataan Bahu Jalan Ds. Karyamukti - Ds. Mekarmukti Kec. Cibalong			
		13 Rekonstruksi ruas jalan Simpang - Cimadang Kec. Cibalong			
		14 Rekonstruksi Simpang Najaten Ds. Simpang Kec. Cibalong			
		15 Rekonstruksi Simpang - Sancang Ds. Simpang Kec. Cibalong			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		16 Rekonstruksi Jalan Desa Talagasari Kec. Banjarwangi - Desa Pancasura Kec. Singajaya			
		17 Rekonstruksi Jalan Desa Menuju wisata TI - Tonjong Karang Desa Karang Agung Kec. Singajaya			
		18 Rekonstruksi Jalan Desa Mekartani Kec. Singajaya			
		19 Rekonstruksi Jalan Cibudug- Cipicung			
		20 Rekonstruksi Jalan Desa Purbayani Caringin			
		21 Rekonstruksi Jalan Desa Bencana Longsor Ciputat- Jamewaru Desa Saribakti Kecamatan Peundeuy			
		22 Rekonstruksi Jalan Desa, Kp. Cikarang s.d. Kp. Panyingkiran Desa Mekartani Kec. Singajaya			
		23 Rekonstruksi Jalan Desa Hegarmanah Kec. Bungbulang			
		24 Rekonstruksi Jalan Desa Mekarsari Kec.Mekarmukti			
		25 Rekonstruksi Jalan Kp. Cibuni Desa Karang Agung Kec. Singajaya			
		26 Rekonstruksi Jalan Penghubung Kel. Margawati dan Neglasari Kec. Garutkota			
		27 Rekonstruksi jalan ruas jalan cikamiri sukapadang, Kab. Garut, Samarang, Cintakarya			
		28 Rekonstruksi jalan Kp.Ciguruwik Rw 12, Kab. Garut, Garut Kota, Cimuncang			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		29 Rekonstruksi jalan Kp. Lempong- Kp. Patrol, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar			
		30 Rekonstruksi jalan Jln.Terusan Gagak Lumayung s/d Lampegan, Kab. Garut, Garut Kota, Kota Wetan			
4	Rehabilitasi Jalan	1 Rehabilitasi Jalan Pembangunan	Panjang jalan yang direhabilitasi	9,68 Km	
		2 Jalan Dalam Kota Garut Wil Tarogong			
		3 Jalan Dalam Kota Kecamatan Cikajang			
		4 Jalan Dalam Kota Kecamatan Cisompet			
		5 Jalan Dalam Kota Kecamatan Limbangan			
		6 Jalan Dalam Kota Kecamatan Malangbong			
		7 Jalan Dalam Kota Kecamatan Pameungpeuk			
		8 Jalan Dalam Kota Kecamatan Cibatuu			
		9 Rehabilitasi Jalan Ds. Mekarmukti Kec. Cibalong			
		10 Jalan Dalam Kota Kecamatan Leles			
		11 Rehabilitasi Jalan Kp. Babakan RT. 04 RW. 06 Ds. Cisituu Kec. Malangbong			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		12 Rehabilitasi jalan Kp. Kudang Ds. Wanajaya Kec. Wanaraja			
		13 Rehabilitasi Jalan Ciojar - Mekarsari DS. Mekarjaya Kec. Tarogongkaler			
5	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang jalan yang dipelihara	201,50 Km	
6	Pembangunan Jembatan	1 Pembangunan Jembatan Cipaleubuh Ds. Panyindangan Kec. Cisompet	Panjang jembatan yang terbangun	0,64 Km	
		2 Pembangunan Jembatan Cirompang Bungbulang			
		3 Pembangunan Jembatan Tanjungjaya - Tegalgede Pakenjeng			
		4 Pembangunan Jembatan - Jembatan pada Ruas Jalan - Jalan Baru			
		5 Pembangunan Jembatan Cibaluk Ds. Mekarwangi - Ds. Sagara Kec. Cibalong			
		6 Pembangunan Jembatan Cibaluk Desa Pangsumasan Kec. Peundeuy			
		7 Pembangunan Jembatan TAKOCIM (Tajur-Kodehel-Cimanglid) Kec. Cihurip			
		8 Pembangunan Jembatan Cimangke (Ds. Ciroyom - Ds. Kertamukti) Kec. Cikelet			
		9 Pembangunan Jembatan Jati Kec. Samarang			
		10 Pembangunan Jembatan Cibera Ds. Garonggong Kec. Cibalong			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		11 Pembangunan Jembatan Cibaluk Ds. Sagara Kec. Cibalong			
		12 Pembangunan Jembatan Cisanggiri Kp. Kalong Desa Mekarmukti Kec. Cibalong			
		13 Pembangunan Jembatan Desa Dangieng Kec. Banjarwangi			
		14 Pembangunan Jembatan Kp. Talun Sukawargi Ds. Sukawargi Kec. Cisarupan			
		15 Pembangunan Jembatan Kp. Cikedokan RW.14 Ds. Jangkurang Kec. Leles			
		16 Pembangunan/Rehab Jembatan Kp. Cibitung, Kab. Garut, Bl. Limbangan, Simpen Kidul			
		17 Pembangunan/Rehab Jembatan Kp. Cibatupis Rt 2w2 Rw 06, Kab. Garut, Samarang, Cisarua			
		18 Pembangunan/Rehab Jembatan Kp. Citandangan, Kab. Garut, Malangbong, Citeras			
		19 Pembangunan/Rehab Jembatan Kp. Cihoe -Kp Cigorowong Rw 02, Kab. Garut, Malangbong, Cilampuyang			
		20 Pembangunan/Rehab Jembatan Kp. Cimasuk Girang Rt/Rw 006/003 (Curug), Kab. Garut, Karangtengah, Cintamanik			
		21 Pembangunan/Rehab Jembatan Kampung Pangkalan, Kab. Garut, Pamulihan, Linggarjati			
		22 Pembangunan/Rehab Jembatan Kampung Sawah Limus RW 04, Kab. Garut, Mekarmukti, Mekarmukti			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
		23 Pembangunan/Rehab Jembatan Kp. Palimping RT 03/RW 08, Kab. Garut, Sukawening, Sudalarang			
		24 Pembangunan/Rehab Jembatan Kp. Cibangkerong Rw 03, Kab. Garut, Malangbong, Mekarmulya			
		25 Pembangunan/Rehab Jembatan Kp. Sekarwangi, Kab. Garut, Malangbong, Sekarwangi			

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan setiap daerah menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ayat (2) Pasal 2, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*. Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dari uraian tersebut di atas, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berusaha mensinergikan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan telaahan dan identifikasi terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Dalam telaahan dan identifikasi ini dicermati Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil identifikasi, prioritas pembangunan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

**Prioritas Nasional (PN):**

PN2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemerataan.

PN5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

**Prioritas Provinsi (PP):**

PP10 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Prioritas Daerah (PD):**

PD4 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Secara Merata.

**Prioritas Nasional (PN):**

PN6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

**Prioritas Provinsi (PP):**

PP6 : Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana.

PP10 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Prioritas Daerah (PD):**

PD6 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana .

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024**  
**dengan Prioritas Nasional Tahun 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

<b>Prioritas Nasional (PN)</b>	<b>Prioritas Provinsi (PP)</b>	<b>Prioritas Daerah (PD)</b>	<b>Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait dengan Prioritas Daerah</b>
PN1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	PD1 Penurunan Angka Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Prioritas Nasional: PN1, PN2, PN3 Prioritas Provinsi: PP2, PP4
PN2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemerataan	PP2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	PD2 Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban Serta Politik dan Demokrasi	Prioritas Nasional: PN4, PN7 Prioritas Provinsi: PP5, PP9
PN3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	PD3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, KB, Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Pemuda dan Olah Raga	Prioritas Nasional: PN3 Prioritas Provinsi: PP1, PP5
PN4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	PD4 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Secara Merata	Prioritas Nasional: PN2, PN5 Prioritas Provinsi: PP10
PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP5 Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	PD5 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	Prioritas Nasional: PN1, PN4 Prioritas Provinsi: PP2, PP3, PP11

<b>Prioritas Nasional (PN)</b>	<b>Prioritas Provinsi (PP)</b>	<b>Prioritas Daerah (PD)</b>	<b>Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait dengan Prioritas Daerah</b>
PN6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PP6 Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PD6 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana	Prioritas Nasional: PN6 Prioritas Provinsi: PP6, PP10
PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PD7 Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Prioritas Nasional: PN7 Prioritas Provinsi: PP7, PP8
	PP8 Gerakan Membangun Desa	PD8 Peningkatan Investasi dan Pendapatan Daerah	Prioritas Nasional: PN1, PN7 Prioritas Provinsi: PP2, PP7
	PP9 Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara		
	PP10 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	PP11 Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata		

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan pernyataan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

#### **Tujuan:**

Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, sanitasi dan bangunan yang berkualitas dan memadai dengan berbasis penataan ruang.

#### **Sasaran:**

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem irigasi dan konservasi sumber daya air;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
5. Meningkatnya kualitas bangunan gedung;
6. Meningkatnya kualitas bangunan dan lingkungan;
7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan;
8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
9. Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempertimbangkan pencapaian Visi **“Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”** dan Misi Mewujudkan Pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 sebagai berikut:

## **BAB IV**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja berupa program dan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan dan fungsi penyelenggaraan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang didalamnya mencakup penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun secara tahunan ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2022, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2022 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai.

Rencana Kerja akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak. Adanya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat melaksanakan tugas secara bertahap, terarah dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi lain yang terkait untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**